

ANALISIS PARAMETER DEMOGRAFI DALAM PERSPEKTIF TEORI TRANSISI DEMOGRAFI: STUDI KASUS DINAS PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG

Fisca Putri Rahdiana¹, Nazara Dea Ratna Putri², Regita Ayu Agustin³, Salviaputri Irsha Khamini⁴, Najwa Mayang Dayatri⁵, Yayan Nuryanto, S.Sos., M.Si.⁶, Agus Taryana, S.AP.,M.AP.⁷
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juni 2025

Available online Juni 2025

fisca23001@mail.unpad.ac.id¹,
nazara23001@mail.unpad.ac.id²,
regita23001@mail.unpad.ac.id³,
salviaputri23001@mail.unpad.ac.id⁴,
najwa23032@mail.unpad.ac.id⁵,
yayan.nuryanto@unpad.ac.id⁶,
agus.taryana@unpad.ac.id⁷



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji aspek demografis Kota Bandung melalui lensa teori transisi demografi, dengan penekanan pada kontribusi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) dalam pengelolaan informasi kependudukan. Teori transisi demografi menerangkan tentang perubahan dalam struktur dan sifat populasi yang dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, mobilisasi, serta perpindahan penduduk, selain itu juga terkait dengan kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Disdukcapil memegang peranan penting dalam memastikan keakuratan data kependudukan dan mendukung perencanaan pembangunan yang bergantung pada data yang valid. Pentingnya pembaharuan dalam pelayanan pengelolaan kependudukan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan ketepatan pencatatan dan mendukung kebijakan pembangunan yang responsif terhadap perubahan demografi.

Kata Kunci: Teori Transisi Demografi, Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Fertilitas, Mortalitas, Mobilisasi, Perpindahan Penduduk

Abstract. The purpose of this study is to examine the demographic aspects of Bandung City through the lens of demographic transition theory, with an emphasis on the contribution of the Population and Civil Registration Service (DISDUKCAPIL) in managing population information. The demographic transition theory explains changes in the structure and nature of the population that are influenced by fertility, mortality, mobilization, and population movement, as well as related to the socio-economic progress of the community. Disdukcapil plays an important role in ensuring the accuracy of population data and supporting development planning that relies on valid data. The importance of renewal in population management services and the use of technology to improve the accuracy of recording and support development policies that are responsive to demographic changes.

Keywords: Demographic Transition Theory, Bandung City, Population and Civil Registration Service, Fertility, Mortality, Mobilization, Population Migration

PENDAHULUAN

Perubahan dinamika kependudukan di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Bandung, menjadi isu krusial dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menuntut adanya pengelolaan administrasi kependudukan yang akurat dan responsif. Dalam konteks ini,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung memegang peranan sentral dalam memastikan validitas data kependudukan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik.

Salah satu kerangka teoritis yang relevan untuk memahami perubahan struktur dan dinamika penduduk adalah teori transisi demografi yang dikemukakan oleh Warren Thompson. Teori ini menyoroti perubahan bertahap dalam tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi seiring dengan kemajuan sosial ekonomi, urbanisasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kota Bandung, sebagai kota yang terus berkembang, memperlihatkan karakteristik transisi demografi dengan penurunan angka fertilitas dan mortalitas, serta meningkatnya angka harapan hidup. Perubahan ini juga berdampak pada meningkatnya mobilitas dan arus migrasi penduduk ke wilayah perkotaan.

Di tengah dinamika tersebut, tantangan dalam pengelolaan administrasi kependudukan semakin kompleks. Akurasi pencatatan peristiwa kependudukan, seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan, menjadi sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah menegaskan kewajiban pelaporan dan pencatatan setiap peristiwa kependudukan. Implementasi sistem digital, seperti aplikasi SALAMAN dan Data Konsolidasi Bersih (DKB), merupakan inovasi Disdukcapil Kota Bandung untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan administrasi kependudukan.

Selain itu, perubahan demografi di Kota Bandung juga menimbulkan konsekuensi sosial seperti meningkatnya kepadatan penduduk, kemacetan, dan tantangan dalam penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai transisi demografi, khususnya aspek fertilitas, mortalitas, dan migrasi, sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan solutif. Studi ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek demografi Kota Bandung melalui lensa teori transisi demografi, dengan menyoroti peran Disdukcapil dalam pengelolaan informasi kependudukan dan relevansinya terhadap kebijakan pembangunan kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memaparkan hasil wawancara dan pengumpulan informasi yang telah dilakukan tentang parameter demografi yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dengan menekankan gambaran menyeluruh dari fenomena tersebut, tanpa memecahnya menjadi variabel-variabel yang saling berhubungan. Pendekatan ini digunakan karena mampu menggali secara langsung dan mendalam terkait realitas sosial dan fakta lapangan melalui data yang dikolektifkan dari sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan memiliki sasaran penelitian yaitu kepala bidang pencatatan perpindahan penduduk.

Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka menjadi cara dalam pengambilan serta pengumpulan data. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data serta jawaban atas pertanyaan yang telah disusun secara langsung dari narasumber di Disdukcapil Kota Bandung. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dari sumber-sumber tertulis. Teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan reduksi data, yaitu tahap menyeleksi dan merangkum data yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Transisi Demografi menurut Warren Thompson

Teori transisi demografi dikemukakan oleh Warren Thompson pada tahun 1929, berdasarkan hasil pengamatannya terhadap perubahan angka kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas) di negara industri. Teori ini menjelaskan proses transisi penduduk dari kondisi dengan kelahiran dan kematian yang tinggi ke kondisi dengan kelahiran dan kematian yang rendah. Thompson mengamati bahwa masyarakat di negara-negara industri mengalami transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi ke tingkat yang rendah selama kurun waktu 200 tahun. Dalam teori ini, transisi demografi dipandang sebagai proses bertahap di mana pada awalnya baik angka kelahiran maupun kematian berada pada tingkat yang tinggi sehingga pertumbuhan penduduk relatif lambat. Seiring dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan, angka kematian mulai menurun lebih cepat dibandingkan angka kelahiran. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi meningkat dengan tajam. Angka kelahiran juga mulai menurun sehingga pertumbuhan penduduk kembali melambat dan akhirnya stabil pada tingkat yang rendah.

Sebagian besar negara maju telah melewati seluruh tahapan transisi ini dan memiliki tingkat kelahiran serta kematian yang rendah, sedangkan negara-negara berkembang masih berada dalam proses transisi tersebut. Namun, berbeda dengan negara maju, sebagian besar negara berkembang sedang menjalani proses transisi demografi. Terdapat pengecualian pada beberapa negara miskin terutama di kawasan Afrika Sub-Sahara dan Timur Tengah yang masih memiliki angka kelahiran dan kematian yang tinggi. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan yang meluas, ketidakstabilan politik, konflik berkepanjangan, serta kebijakan pemerintah yang tidak mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Teori transisi demografi menyoroti bahwa penurunan angka kelahiran dan kematian sangat erat kaitannya dengan kemajuan sosial dan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan per kapita, akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, serta peran perempuan dalam perekonomian. Selain itu, faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, urbanisasi, jaminan sosial, dan perubahan nilai budaya juga turut mempengaruhi dinamika transisi demografi di berbagai negara.

Model transisi demografi sendiri banyak digunakan untuk memproyeksikan perubahan jumlah penduduk di masa depan, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami tahapan transisi demografi, para perencana pembangunan dan pembuat kebijakan dapat memprediksi kebutuhan sumber daya, tenaga kerja, serta tantangan sosial-ekonomi yang mungkin akan dihadapi. Namun, model ini merupakan generalisasi dan tidak selalu berlaku sama di semua negara, karena laju dan pola transisi sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, ekonomi, dan politik masing-masing negara.

Fertilitas

Fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita, dengan kata lain fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Menurut teori Ronald Freedman dalam *the sociology of human fertility* (1975) mengemukakan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung meliputi demografi, sosial ekonomi, kematian, norma, lingkungan. Demografi disini menjelaskan umur dan tempat tinggal seseorang. Sosial ekonomi dapat dijelaskan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan kepemilikan kekayaan. Kematian dapat dijelaskan kematian bayi secara langsung berpengaruh terhadap kesuburan sang ibu karena sudah tidak lagi menyusui bayinya. Norma dapat dijelaskan norma-norma yang berada di masyarakat dapat mempengaruhi fertilitas yang diinginkan seseorang. Lingkungan termasuk faktor langsung yang dapat mempengaruhi fertilitas seseorang wanita. Ketika lingkungannya negatif maka akan

berpengaruh negatif juga begitu sebaliknya lingkungan yang ditempati positif maka akan berpengaruh positif. Faktor tidak langsung dibagi menjadi tiga, faktor yang mempengaruhi kemungkinan hubungan kelamin, faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya konsepsi, dan faktor yang mempengaruhi kehamilan atau kelahiran.

Kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau peristiwa melahirkan anak lahir hidup dari seorang perempuan yang biasa dikenal dengan fertilitas adalah salah satu komponen utama yang memengaruhi dinamika jumlah dan struktur penduduk di Kota Bandung bersamaan dengan kematian (mortalitas dan perpindahan (migrasi)). Fertilisasi atau tingkat kelahiran memiliki peran yang ikut serta dalam membentuk proyeksi penduduk dan menentukan laju pertumbuhan penduduk kota Bandung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2024, jumlah penduduk Kota Bandung tercatat sekitar 2.591.763 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 151,9 km², kepadatan penduduk Kota Bandung pada tahun 2024 mencapai sekitar 17.055 jiwa per km², hal ini memiliki keterkaitan dengan angka kelahiran yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepadatan dan jumlah penduduk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, jumlah bayi lahir di Kota Bandung pada tahun 2022 tercatat sebanyak 37.338 jiwa. Angka kelahiran tahunan di Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran 35.000-38.000 kelahiran per tahun.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 Long Form, angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) Kota Bandung tercatat sebesar 1,83. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata seorang perempuan di Kota Bandung selama masa reproduksinya melahirkan sekitar 1-2 anak, yang berarti sudah berada di bawah tingkat penggantian (replacement level) sebesar 2,1. Penurunan TFR ini menandai terjadinya transisi demografi, di mana masyarakat kota mengalami pergeseran dari tingkat fertilitas tinggi menuju fertilitas rendah, sejalan dengan teori transisi demografi yang mengaitkan penurunan kelahiran dengan kemajuan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tren penurunan fertilitas di Kota Bandung sangat nyata dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2010, TFR Kota Bandung masih berada di angka 2,00, namun menurun menjadi 1,83 pada tahun 2020. Penurunan ini berdampak langsung pada proporsi penduduk usia anak-anak yang semakin mengecil, sementara kelompok usia produktif dan lansia cenderung meningkat. Pola fertilitas di Kota Bandung juga memperlihatkan karakteristik khas perkotaan, yaitu puncak angka kelahiran spesifik usia (Age-Specific Fertility Rate/ASFR) terjadi pada kelompok umur 25-29 tahun, dengan 118 kelahiran per 1.000 perempuan di kelompok usia tersebut. Angka kelahiran pada remaja (15-19 tahun) relatif rendah, hanya 10 kelahiran per 1.000 perempuan, dan menurun drastis pada usia di atas 30 tahun.

Tingkat kelahiran yang relatif stabil di Kota Bandung mencerminkan adanya pola fertilitas masyarakat perkotaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek-aspek yang mempengaruhi angka kelahiran di Kota Bandung adalah yang pertama, usia perkawinan. Usia saat menikah sangat berpengaruh terhadap angka kelahiran. Dimana, semakin muda usia perempuan menikah, semakin panjang masa reproduksi dan berpotensi meningkatkan angka kelahiran. Kedua, tingginya angka perkawinan di masyarakat Kota Bandung yang menjadi salah satu pendorong fertilitas. Ketiga, tingkat pendidikan khususnya pada perempuan, karena pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita, maka semakin rendah angka kelahiran karena adanya pengetahuan lebih baik tentang kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan prioritas terhadap karier atau pendidikan lanjutan. Keempat, sosial ekonomi (pendapatan), dimana kondisi ekonomi rumah tangga dengan tingkat pendapatan baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, mempunyai standar dan keinginannya masing masing dalam menentukan jumlah anak berdasarkan jumlah pendapatannya karena cenderung mempertimbangkan biaya hidup dan kualitas pendidikan anak. Kelima, penggunaan alat kontrasepsi baik jangka pendek maupun jangka panjang di Kota

Bandung cenderung tinggi, sehingga menekan angka kelahiran. Keenam, lingkungan sosial dan budaya yang mendukung perilaku reproduksi sehat, seperti lingkungan yang memberikan akses informasi dan layanan kesehatan, menurunkan angka kelahiran.

Mortalitas

Warren Thompson dalam Teori Transisi Demografi (1929) menjelaskan mortalitas sebagai salah satu pilar utama yang menggerakkan evolusi kependudukan. Teori ini membagi empat tahap perkembangan populasi, di mana mortalitas mengalami penurunan signifikan akibat kemajuan medis, sanitasi, dan peningkatan kualitas hidup. Penurunan mortalitas pada tahap transisi awal memicu ledakan populasi, yang kemudian diikuti penurunan fertilitas seiring pembangunan ekonomi dan edukasi. Dalam konteks Kota Bandung, dinamika ini tercermin dari peningkatan kepadatan penduduk akibat migrasi dan penurunan angka kematian. Penurunan mortalitas meningkatkan harapan hidup dan kepadatan penduduk, memicu migrasi ke pusat urban seperti Bandung. Makalah menyebutkan bahwa faktor push (lapangan kerja sempit) dan pull (kesempatan kerja lebih baik) mendorong migrasi ini. Pemerintah merespons melalui UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 4 yang mewajibkan pencatatan setiap peristiwa kependudukan—termasuk kematian—untuk memastikan data akurat. Sistem Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang diimplementasikan Disdukcapil Bandung (Bab II) selaras dengan Pasal 13 PP No. 40/2019, yang menekankan integrasi data berbasis NIK untuk menghindari duplikasi. Akurasi data mortalitas krusial untuk perencanaan kesehatan dan infrastruktur. Disdukcapil Bandung mengadopsi aplikasi SALAMAN (Selesai Dalam Genggaman) guna memfasilitasi pelaporan kematian secara digital. Inovasi ini berlandaskan Pasal 13 UU No. 24/2013 tentang penyelenggaraan administrasi elektronik, diperkuat Permendagri No. 72/2022 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Keamanan data mortalitas dijamin melalui Pasal 35 UU No. 24/2013 tentang kerahasiaan data, dengan Disdukcapil merekrut ahli TI dan memperbarui sistem keamanan secara berkala.

Masyarakat yang abai melaporkan kematian menghambat akurasi data mortalitas. Disdukcapil Bandung mengatasi ini melalui layanan keliling (MAPELING) dan edukasi, merujuk Pasal 59 UU No. 24/2013 tentang kewajiban sosialisasi administrasi kependudukan. Pasal 82 Ayat 1 UU tersebut juga memberikan sanksi administratif bagi pelapor yang lalai, memastikan kepatuhan dalam pencatatan mortalitas. Ledakan populasi akibat penurunan mortalitas memperburuk masalah kepadatan di Bandung. Makalah mencatat dampak seperti kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan. Disdukcapil merespons dengan verifikasi data enam bulanan melalui DKB, yang sejalan dengan Pasal 15 Ayat 2 PP No. 40/2019 tentang pemutakhiran data berkala. Kebijakan ini membantu memproyeksikan kebutuhan layanan kesehatan dan infrastruktur berdasarkan tren mortalitas. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat 2023: Angka Kematian Bayi turun dari 24/1.000 kelahiran (2015) menjadi 18/1.000 (2023). Harapan Hidup di Bandung mencapai 71.5 tahun (2023), lebih tinggi dari rata-rata nasional (69.8 tahun).

Teori Thompson menyoroti mortalitas sebagai penggerak transisi demografi yang memicu migrasi ke Bandung. Pelaksanaan UU No. 24/2013 dan turunannya (PP No. 40/2019, Permendagri No. 72/2022) menjadi landasan hukum bagi Disdukcapil Bandung dalam mengelola data mortalitas melalui DKB dan SALAMAN. Sinergi antara penurunan mortalitas, tata kelola administrasi berbasis hukum, dan inovasi digital menjadi kunci menyeimbangkan dinamika kependudukan dan pembangunan berkelanjutan.

Mobilitas

Pada teori Transisi Demografi menurut Warren Thompson (1929) menyebutkan bahwa mobilitas penduduk sangat erat kaitannya dengan perubahan struktur demografi yang terjadi

seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Thompson membagi proses transisi demografi ke dalam beberapa tahap, dimulai dari tahap di mana angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi pada masyarakat pra-industri. Seiring waktu, angka kematian menurun terlebih dahulu akibat kemajuan di bidang kesehatan dan sanitasi, sementara angka kelahiran masih tetap tinggi. Hal ini menyebabkan pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatkan jumlah penduduk usia muda.

Mobilitas ini semakin tinggi seiring dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya pendidikan serta keterampilan penduduk. Dengan demikian, mobilitas penduduk menurut teori transisi demografi Warren Thompson merupakan bagian penting dari perubahan demografi, di mana perpindahan penduduk berperan dalam mendistribusikan tenaga kerja dan mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung permasalahan kepadatan penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai aspek yang dapat menyebabkan jumlah penduduk bertambah atau berkurang. Di Kota Bandung sendiri, fenomena ini terjadi karena adanya daya tarik kota yang membuat banyak orang senang datang dan menetap di Bandung. Sebaliknya, terdapat pula penduduk asli Bandung yang memilih untuk pindah ke luar kota. Bagian migrasi/perpindahan di Disdukcapil Kota Bandung memiliki tugas untuk memproses administrasi kepindahan penduduk, baik yang datang dari luar daerah maupun yang pindah keluar dari Kota Bandung. Adapun alasan umum masyarakat melakukan perpindahan antara lain karena kebutuhan pendidikan, pekerjaan, atau pernikahan.

Perpindahan penduduk yang terjadi setiap tahun memberikan dampak terhadap perubahan jumlah penduduk di Kota Bandung, baik berupa peningkatan maupun penurunan kepadatan penduduk. Untuk memantau hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menggunakan database bernama DKB (Data Konsolidasi Bersih), yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2024. Data ini berasal dari pemerintah pusat dan digunakan untuk mencatat seluruh proses perpindahan penduduk, baik yang masuk maupun keluar Kota Bandung. Berdasarkan Wawancara, bidang perpindahan penduduk bertugas untuk mencatat dan menginput data perpindahan, termasuk menerima surat pindah dari daerah asal yang kemudian ditarik datanya dan di masukan ke sistem. Dengan sistem ini, jumlah penduduk dapat dipantau secara akurat apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Seluruh data yang tercatat kemudian direkap secara sistematis dan dilaporkan ke pusat setiap enam bulan sekali.

Perpindahan penduduk juga tidak hanya memakai data base DKB (Data Konsolidasi Bersih) tetapi juga memakai aplikasi yang bernama SALAMAN (Selesai dalam Genggaman) yang mana ini merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi modern yang membantu sistem manual dengan saling melengkapi yang saling melengkapi. Penerapan sistem ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini menegaskan kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan setiap perubahan data kependudukan, termasuk perpindahan tempat tinggal, kepada instansi yang berwenang, yaitu Disdukcapil. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 juga mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan administrasi kependudukan, termasuk mekanisme pencatatan perpindahan penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan seperti Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNl).

Selain layanan daring melalui SALAMAN, Disdukcapil Kota Bandung juga menyediakan layanan manual di kantor kelurahan, kecamatan, dan kantor Disdukcapil bagi warga yang mengalami kendala akses internet atau kesulitan menggunakan aplikasi digital. Data yang

diperoleh dari layanan manual ini tetap diinput ke dalam sistem informasi kependudukan untuk menjaga integritas dan akurasi data secara nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Hal ini menjamin bahwa tidak ada warga yang terabaikan dalam proses administrasi kependudukan, sehingga seluruh data perpindahan penduduk dapat tercatat dengan baik.

Disdukcapil Kota Bandung juga secara rutin melakukan pemutakhiran data kependudukan melalui kegiatan verifikasi faktual di lapangan. Petugas Disdukcapil melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga untuk memastikan bahwa data yang tercatat dalam sistem sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan validitas data kependudukan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, serta penyelenggaraan Pemilu yang adil dan transparan. Selain itu, verifikasi lapangan ini juga membantu mengidentifikasi dan mengoreksi data yang tidak akurat atau sudah tidak relevan, sehingga kualitas data kependudukan selalu terjaga.

Integrasi antara layanan daring melalui aplikasi SALAMAN dan layanan manual, serta pemutakhiran data secara berkala, menjadikan sistem pendataan dan pencatatan perpindahan penduduk di Kota Bandung semakin komprehensif dan efektif. Sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data kependudukan. Dengan data yang akurat dan mutakhir, pemerintah Kota Bandung dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Semua proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menjamin legalitas dan perlindungan hak-hak warga negara dalam administrasi kependudukan.

Secara keseluruhan, mobilitas penduduk merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika demografi suatu wilayah, sebagaimana dijelaskan dalam teori Transisi Demografi oleh Warren Thompson. Di Kota Bandung, mobilitas ini terjadi secara intensif akibat daya tarik kota yang tinggi dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan kualitas hidup. Dampaknya terlihat pada fluktuasi jumlah penduduk setiap tahunnya, yang memerlukan pengelolaan data yang sistematis dan akurat.

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor alami seperti angka kelahiran dan kematian, tetapi juga sangat terkait dengan pergerakan imigran dan emigran. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Bandung menawarkan daya tarik yang signifikan, khususnya dalam sektor pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas kehidupan. Banyaknya universitas terkenal, kesempatan kerja di sektor industri kreatif, teknologi, dan layanan, serta fasilitas kota yang memadai menjadikan Bandung sebagai tujuan utama bagi orang-orang yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Setiap tahun, ribuan individu datang ke Bandung untuk melanjutkan studi, mencari kerja, atau memperbaiki kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, populasi Bandung terus mengalami peningkatan dalam dekade terakhir dan diperkirakan akan mencapai 2,57 juta orang pada tahun 2023, dengan laju pertumbuhan sekitar 20.000 orang per tahun.

Fenomena perpindahan penduduk di Kota Bandung tidak hanya terjadi dari luar menuju kota. Terdapat juga warga setempat yang memilih untuk berpindah ke tempat lain, baik untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan yang lebih baik, atau karena alasan pernikahan dan keluarga. Meskipun jumlah migrasi keluar ini tidak sebesar migrasi masuk, tetap saja mempengaruhi dinamika pertumbuhan penduduk di kota tersebut. Selain itu, keputusan untuk

pindah juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga tanah dan properti, kemacetan, atau keinginan untuk memiliki lingkungan yang lebih tenang di luar kota.

Dalam pandangan teori transisi demografi yang dikemukakan oleh Warren Thompson, perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dapat dipahami melalui empat tahap utama. Pada tahap pertama, baik tingkat kelahiran maupun kematian berada pada level tinggi, yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk tergolong lambat. Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kematian mulai menurun berkat adanya peningkatan dalam layanan kesehatan dan kebersihan, sementara tingkat kelahiran tetap tinggi, yang mengakibatkan lonjakan pertumbuhan penduduk. Pada tahap ketiga, tingkat kelahiran mulai mengalami penurunan akibat adanya transformasi dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, termasuk peningkatan pendidikan serta peran perempuan dalam dunia kerja. Pada tahap keempat, baik tingkat kelahiran maupun kematian berada pada level rendah, sehingga pertumbuhan penduduk menjadi melambat dan kembali berada pada kondisi stabil.

Berdasarkan hasil dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Bandung, Pada fase awal perubahan demografi, seperti yang diuraikan oleh Warren Thompson, baik tingkat kelahiran maupun kematian di Kota Bandung secara historis cukup tinggi. Namun, seiring dengan kemajuan dalam kesehatan, sanitasi, dan gizi, tingkat kematian mulai mengalami penurunan yang signifikan. Pada fase kedua, Informasi dari Disdukcapil Kota Bandung menunjukkan bahwa angka kematian untuk anak-anak dan remaja di bawah lima tahun terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hidup sehat. Berdasarkan data yang diberikan dari Disdukcapil, angka kelahiran di Kota Bandung tercatat 35.000 kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan dekade sebelumnya mencapai 40.000 per tahunnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan banyak perempuan yang menunda pernikahan hingga mempunyai anak. Selain itu, program yang direncanakan oleh pemerintah tentang keluarga berencana bisa saja berjalan dengan baik. Pada fase berikutnya, menurut teori transisi demografi, faktor utama yang menyebabkan penurunan tingkat kelahiran meliputi perubahan sosial dan ekonomi seperti migrasi ke kota, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja. Ini sangat jelas terlihat di Kota Bandung, di mana banyak pasangan muda lebih memilih menunda untuk memiliki anak karena fokus pada karier, pendidikan, dan biaya hidup yang semakin tinggi di kota. Selain itu, cepatnya urbanisasi juga telah mengubah pola keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga kecil, yang pada akhirnya berpengaruh pada jumlah anak yang dimiliki setiap keluarga. Pada fase terakhir, Baik angka kelahiran maupun angka kematian di Kota Bandung kini berada pada tingkat yang relatif rendah dan stabil. Data Disdukcapil menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Bandung kini lebih dipengaruhi oleh arus imigrasi daripada oleh faktor alamiah seperti kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa Bandung telah memasuki tahap transisi demografi tingkat lanjut, dengan pertumbuhan penduduk yang lebih stabil dan lambat, serta struktur penduduk yang lebih matang dengan proporsi penduduk usia kerja yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, dalam pertumbuhan suatu penduduk di Kota Bandung bukan hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Tetapi dipengaruhi oleh faktor migrasi. Diperlukannya pengelolaan administrasi kependudukan sebagai kunci menghadapi pertumbuhan penduduk tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Kota Bandung memiliki aplikasi digital bernama SALAMAN yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan layanan kependudukan dan pencatatan sipil secara online dan dalam waktu nyata.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, dinamika demografi Kota Bandung menggunakan teori transisi demografi sebagai kerangka analisis, menyoroti peran penting Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam pengelolaan data kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bandung mengalami perubahan struktur penduduk yang ditandai dengan penurunan angka fertilitas dan mortalitas, serta peningkatan angka harapan hidup, sejalan dengan proses urbanisasi dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat.

Disdukcapil Kota Bandung memiliki peran strategis dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir. Disdukcapil Kota Bandung memastikan keakuratan data kependudukan yang menjadi dasar perumusan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Disdukcapil memiliki kebutuhan akan pencatatan peristiwa kependudukan yang akurat dan responsif terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi tingginya mobilitas dan arus migrasi ke wilayah perkotaan. Disdukcapil melakukan inovasi melalui implementasi sistem digital seperti aplikasi SALAMAN dan Data Konsolidasi Bersih (DKB), yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan administrasi kependudukan. Pengelolaan administrasi kependudukan yang berbasis teknologi dan data valid sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Bandung. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain diperlukan agar kebijakan yang diambil mampu menjawab tantangan demografi secara tepat dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan. (2018). *Migrasi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan per Desember 2018*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2021). *Proyeksi penduduk Kota Bandung 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020*. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2023). *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2023*.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. (tanpa tahun). *Formulir 1-03 pendaftaran perpindahan penduduk* [PDF].
- Fauzi, A., & Nurhidayat, D. (2020). *Sistem informasi geografis pemetaan penyebaran dan prediksi jumlah penduduk di Kota Bandung*. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 25(2), 112-121.
- Infopublik. (2021, 15 November). *Layanan canggih Admindukcapil Kota Bandung, dari Salaman hingga Terbang*.
- Jurnal Wilayah dan Kota. (2022). *Dinamika pertumbuhan penduduk Kota Bandung dan dampaknya terhadap permintaan pekerjaan*. *Jurnal Wilayah dan Kota*, 14(1), 45-58.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. (n.d.). *Teori Penduduk*. Retrieved from Metrum. (2024, 29 September). *Layanan cepat dan mudah di Disdukcapil Kota Bandung*.
- Rahman, A. (2023). *Ekonomi demografi dan kependudukan*. Nas Media Pustaka.
- Safitri, I. (2022). *Analisis migrasi penduduk di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat* [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository.
- Imelda. (2021). *Migrasi penduduk dan perencanaan pembangunan daerah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. (n.d.). *Dashboard Data Konsolidasi Bersih (DKB)*.
- Adriani, D. (2022). *Transisi demografi beberapa negara Asia: Lesson learn dari masa lalu, masa kini, dan masa depan* (Bab dalam *Sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai perspektif*, hlm. 1-156). Idea Press Yogyakarta. Retrieved July 22, 2022,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Rasyad, R. A., & Abdullah, M. N. A. (2024). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FERTILITAS DI JAWA BARAT: STUDI LITERATUR. SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara, 3(3), 213-218.

Ekawati, R., Herartri, R., Nuraini, N., Rahayuwati, L., & Sukamdi, S. (2017). Fertilitas Migran dan Faktor Yang Memengaruhi Fertilitas di Jawa Barat. *Populasi*, 25(2), 44-53.

Hadiyanto, F. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fertilitas Di Jawa Barat. *Buletin Studi Ekonomi*, 34-42.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). Booklet Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kota Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.